

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

TUJUAN DLH

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan

IDENTIFIKASI CSF

CSF 1

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none">• Menurunnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut

CSF 2

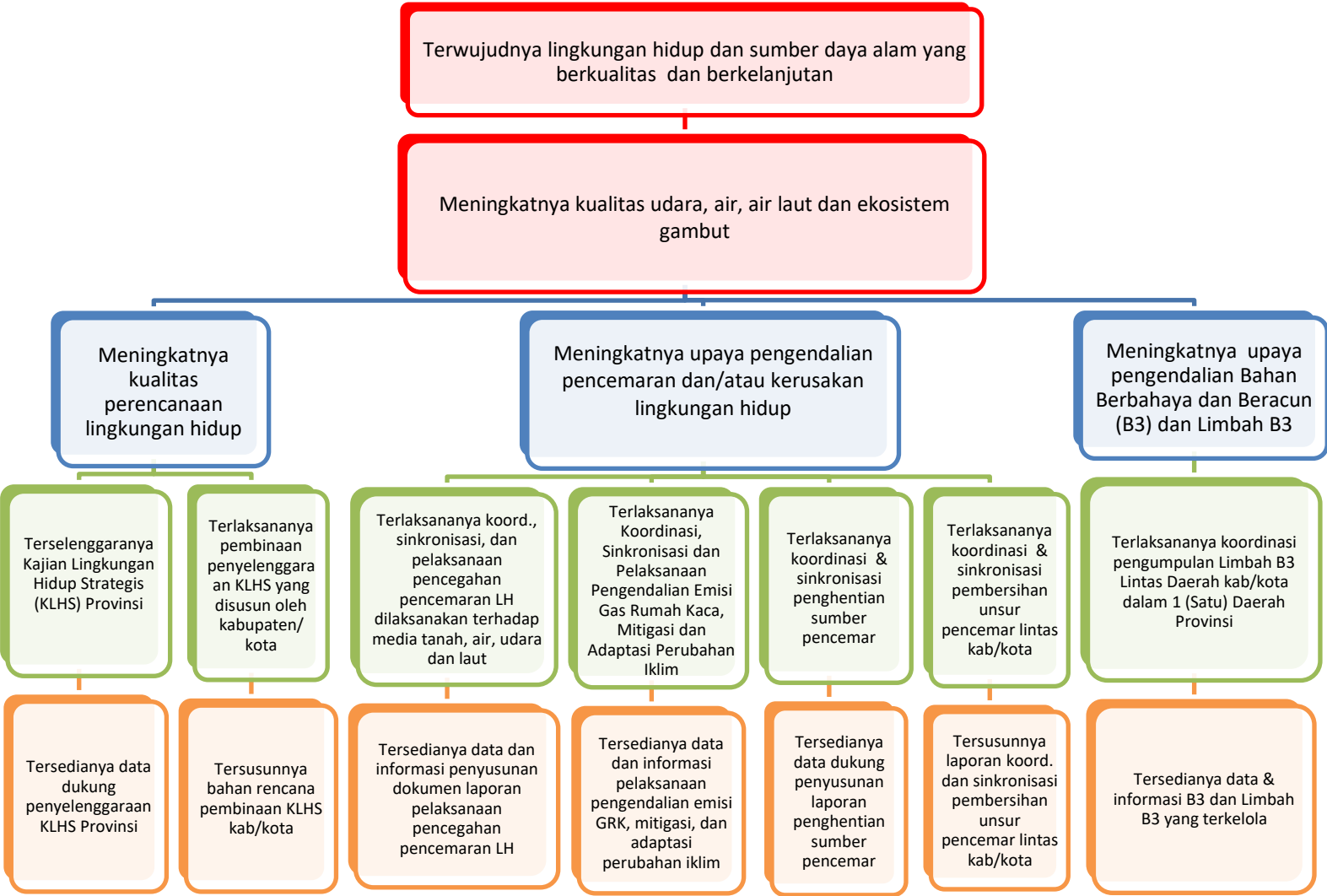
CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas udara, air, air laut dan ekosistem gambut	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kualitas pendayagunaan laboratorium lingkungan
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya upaya pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya upaya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya upaya penanganan pengaduan lingkungan hidup
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya upaya pengelolaan persampahan

CSF 3

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran LH dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar lintas kab/kota
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya upaya pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya koordinasi pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah kab/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya upaya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH Terlaksananya pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Terlaksananya pengawasan perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Terlaksananya peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemberian pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pendampingan pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya penerapan sanksi administrasi yang dikenakan ke penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat yang menjadi kewenangan Provinsi Terlaksananya pengelolaan penanganan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi

<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya pengelolaan persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya penyusunan rencana, kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah Provinsi
--	---

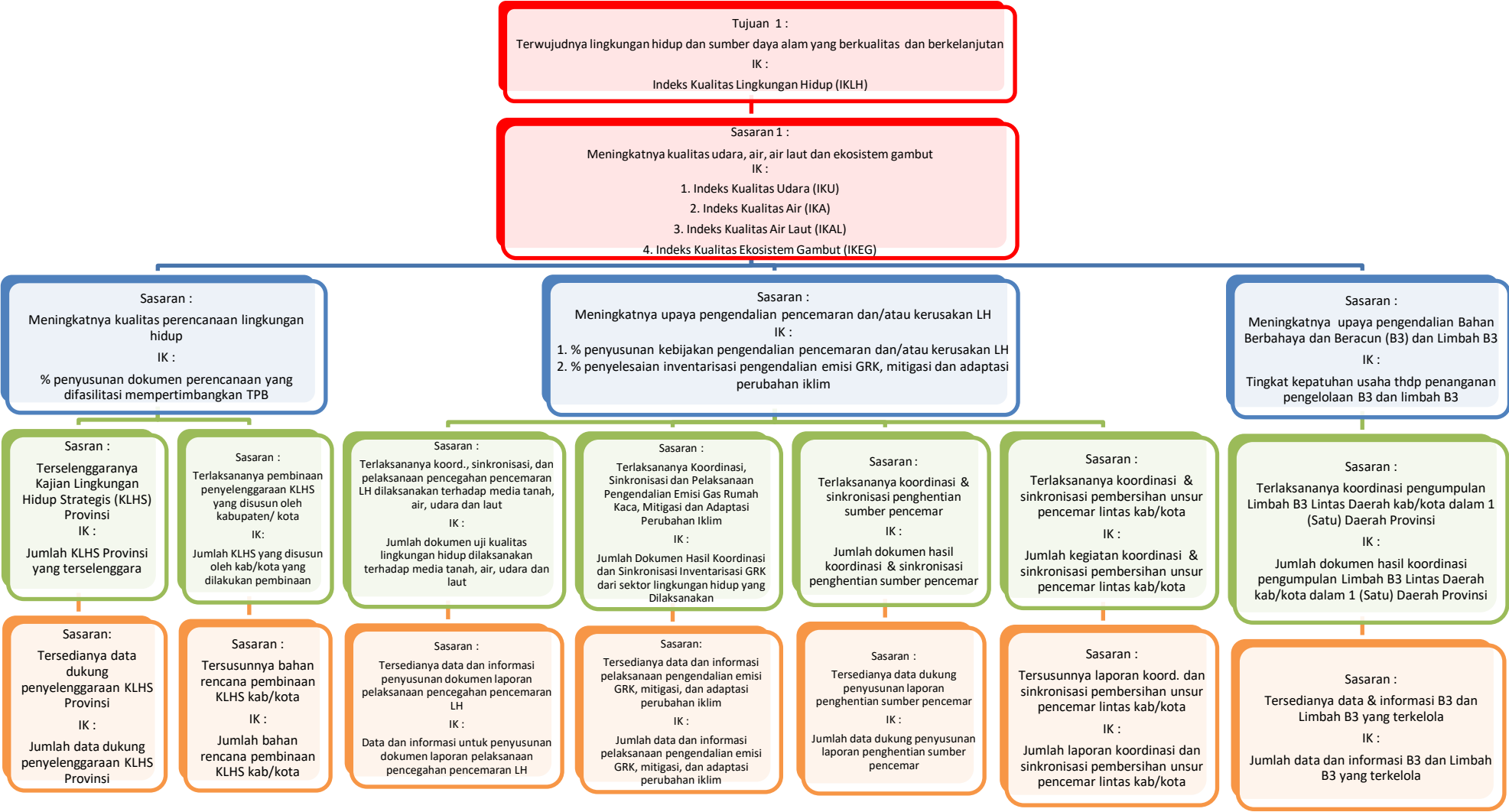
CSF (TUJUAN DLH 1)



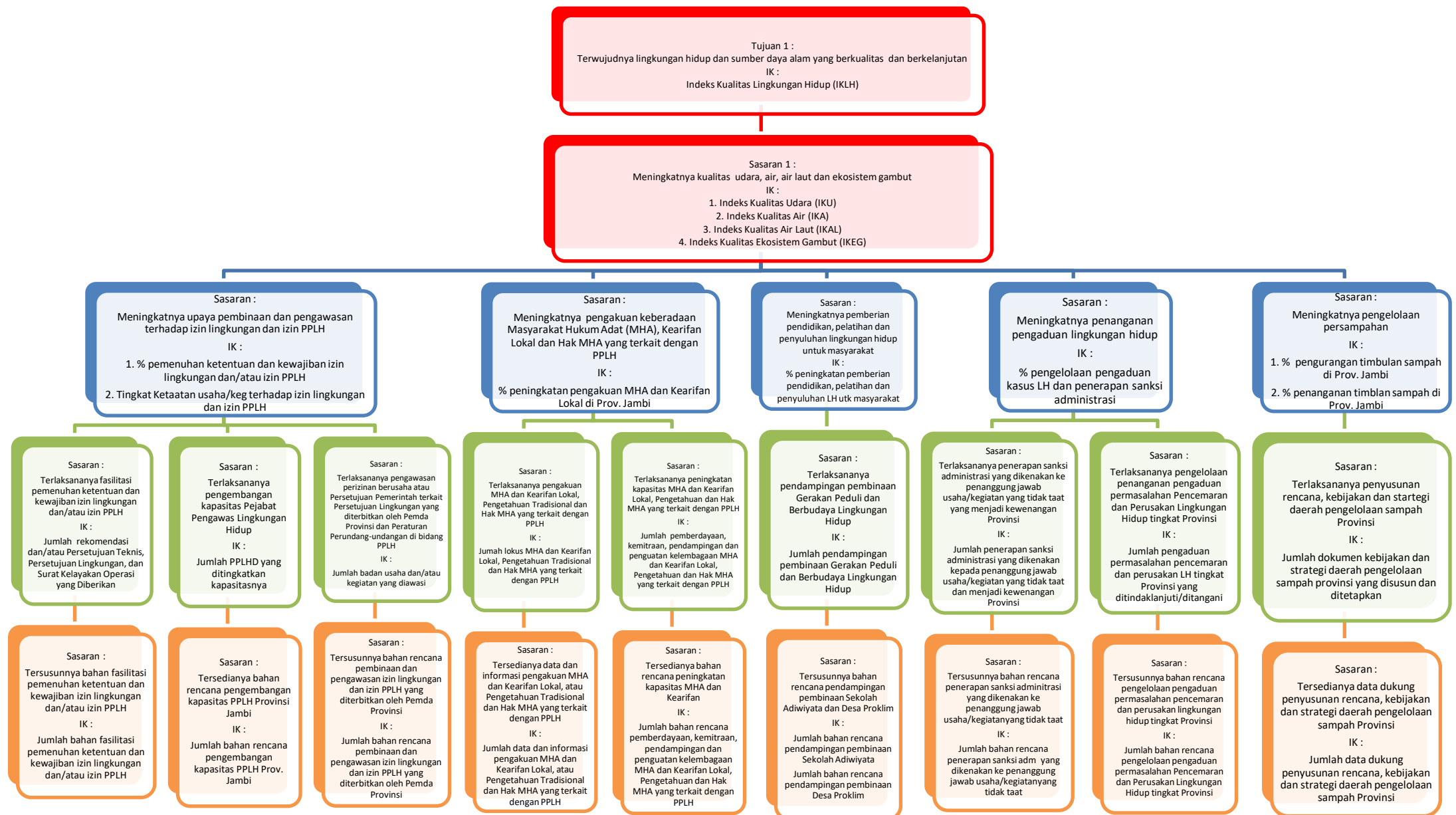
Sambungan CSF Tujuan DLH 1...



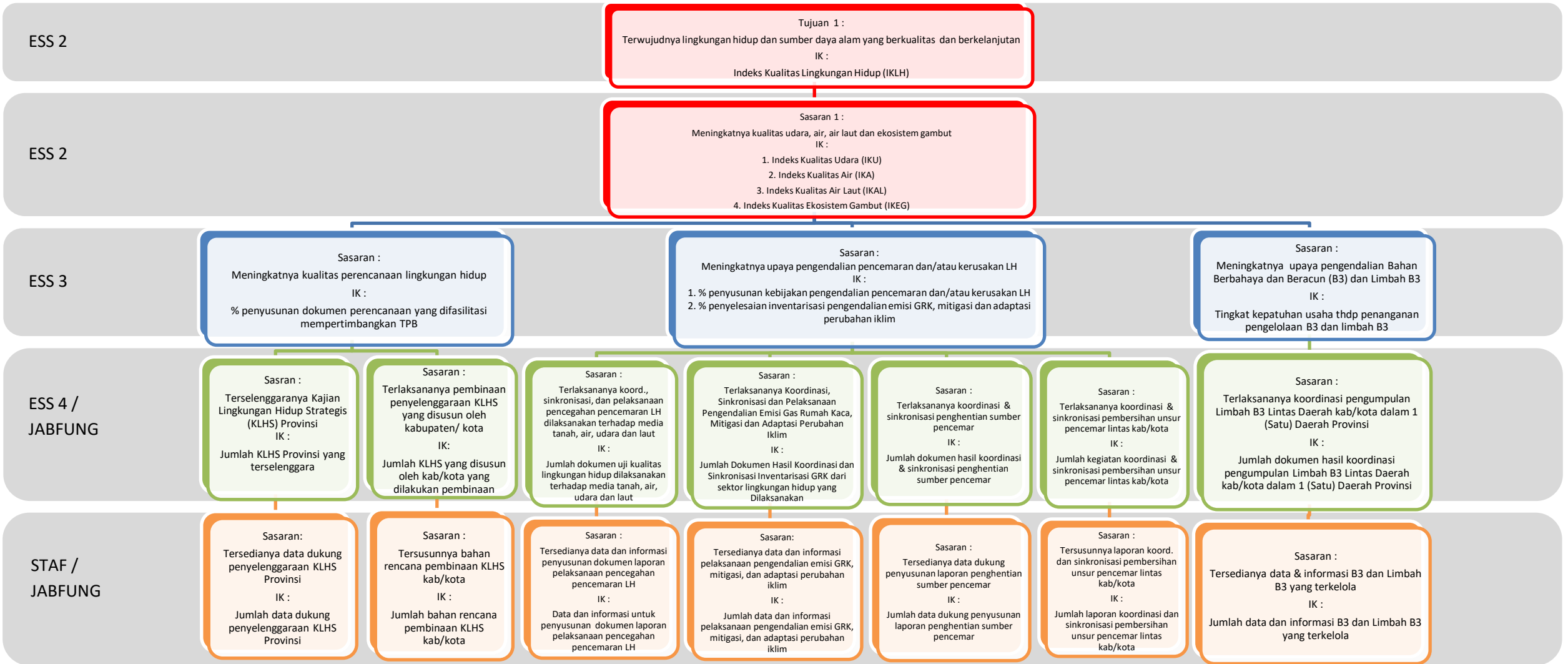
POHON KINERJA (TUJUAN DLH 1)



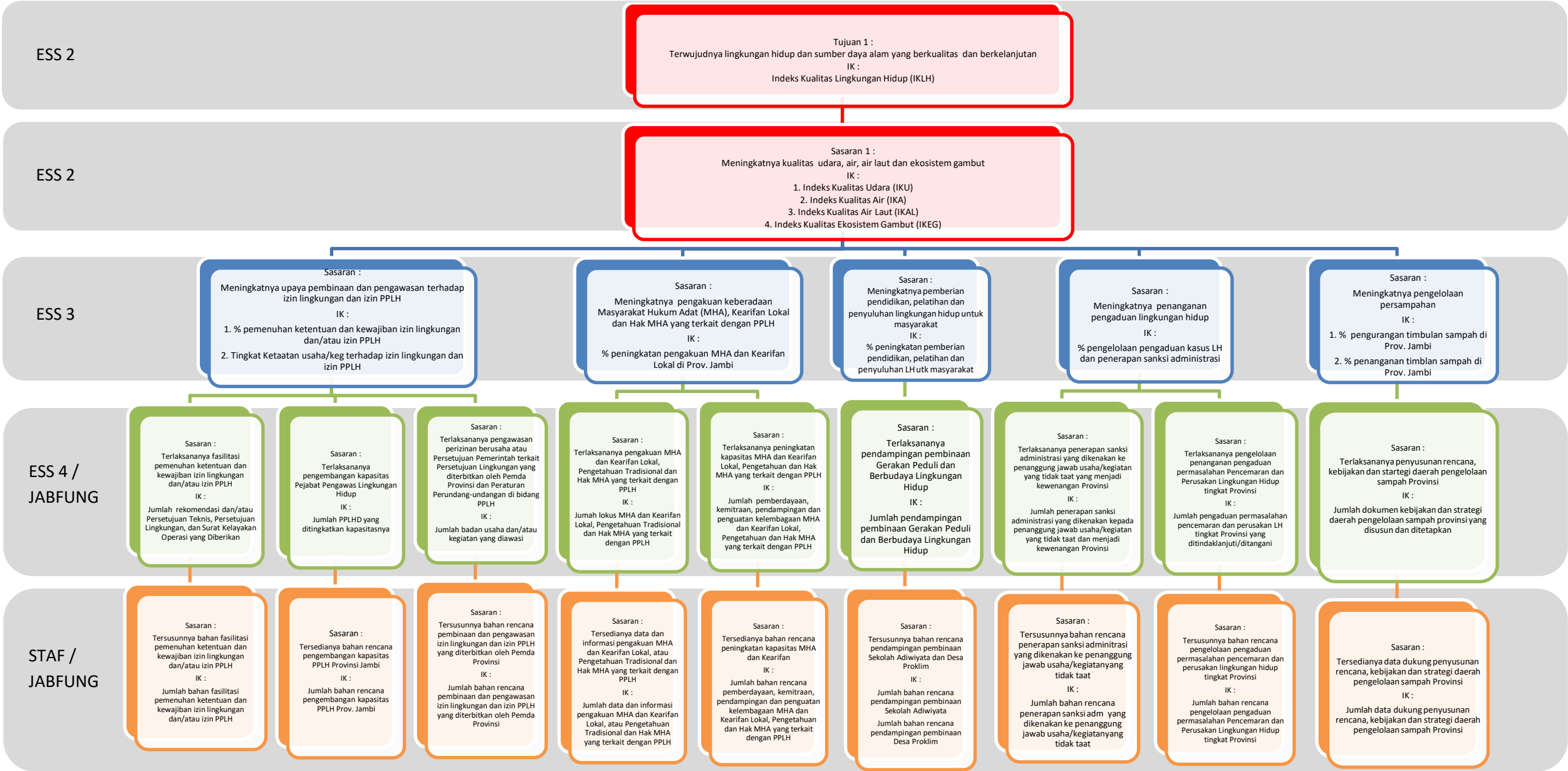
Sambungan Pohon Kinerja Tujuan DLH 1...



CASCADING (TUJUAN DLH 1)



Sambungan Cascading Tujuan DLH 1...



CROSSCUTTING KINERJA

CSF 1

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan SDA Provinsi Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan

CSF 2

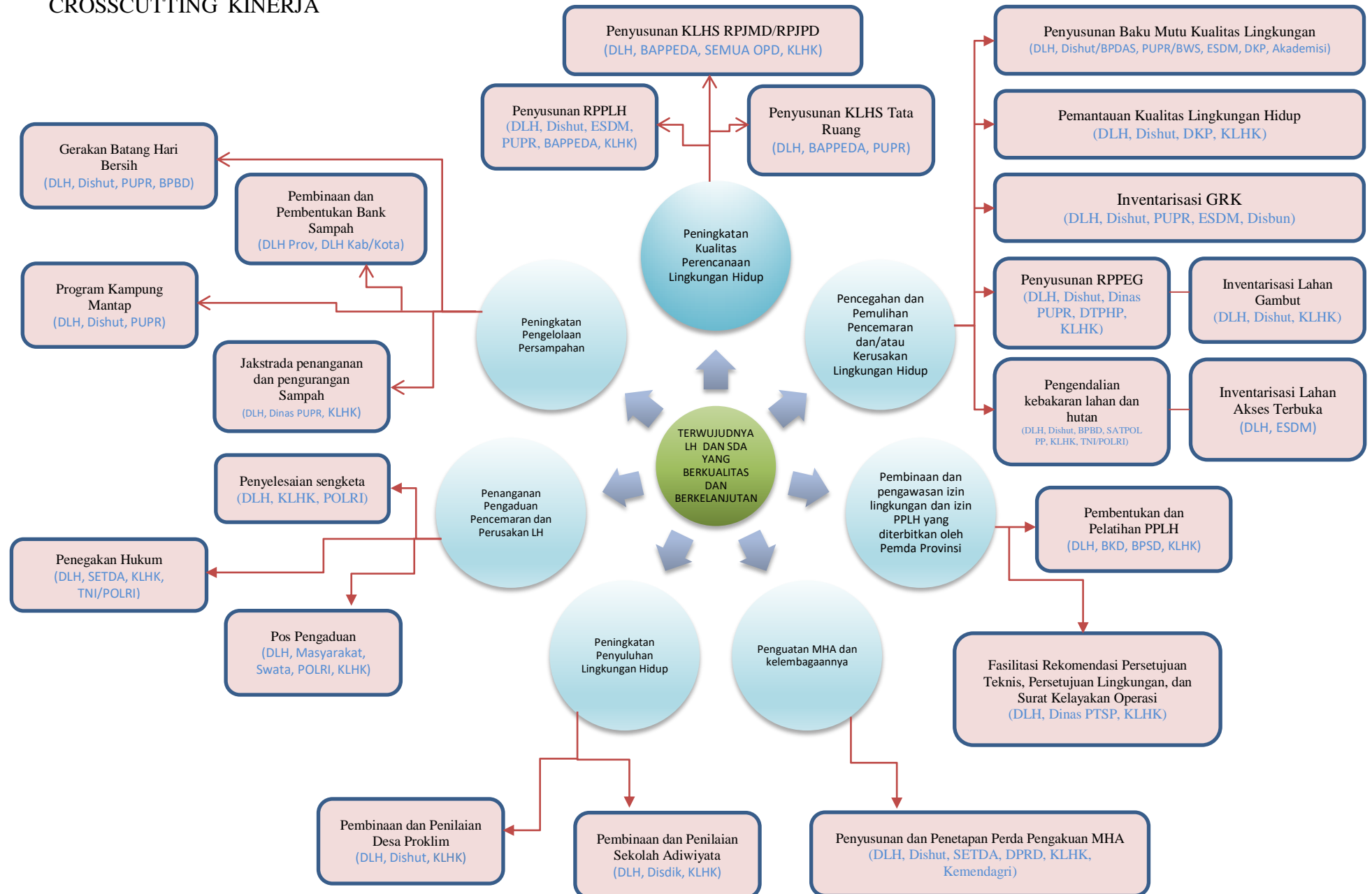
CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup
	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan MHA dan kelembagaannya
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup
	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan LH
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pengelolaan Persampahan

CSF 3

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RPPLH
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan KLHS RPJMD/RPJPD
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan KLHS Tata Ruang
<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Baku Mutu Kualitas Lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi GRK
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RPPEG
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi Lahan Gambut
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi Lahan Akses Terbuka
<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemda Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Rekomendasi Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi
	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan Pelatihan PPLH
<ul style="list-style-type: none"> Penguatan MHA dan kelembagaannya 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan Penetapan Perda Pengakuan MHA
<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Penyuluhan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata
	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Penilaian Desa Proklim

<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan LH 	<ul style="list-style-type: none"> • Pos Pengaduan
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian sengketa
	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Hukum
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Pengelolaan Persampahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Jakstrada penanganan dan pengurangan Sampah
	<ul style="list-style-type: none"> • Gerakan Batang Hari Bersih
	<ul style="list-style-type: none"> • Program Kampung Mantap
	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pembentukan Bank Sampah

CROSSCUTTING KINERJA



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

TUJUAN DLH

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas dan berkelanjutan
2. Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik

2. Terwujudnya tata kelola reformasi birokrasi dan kelembagaan serta pelayanan publik

IDENTIFIKASI CSF TUJUAN DLH 2

CSF 1 :

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none">• Rendahnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik

CSF 2

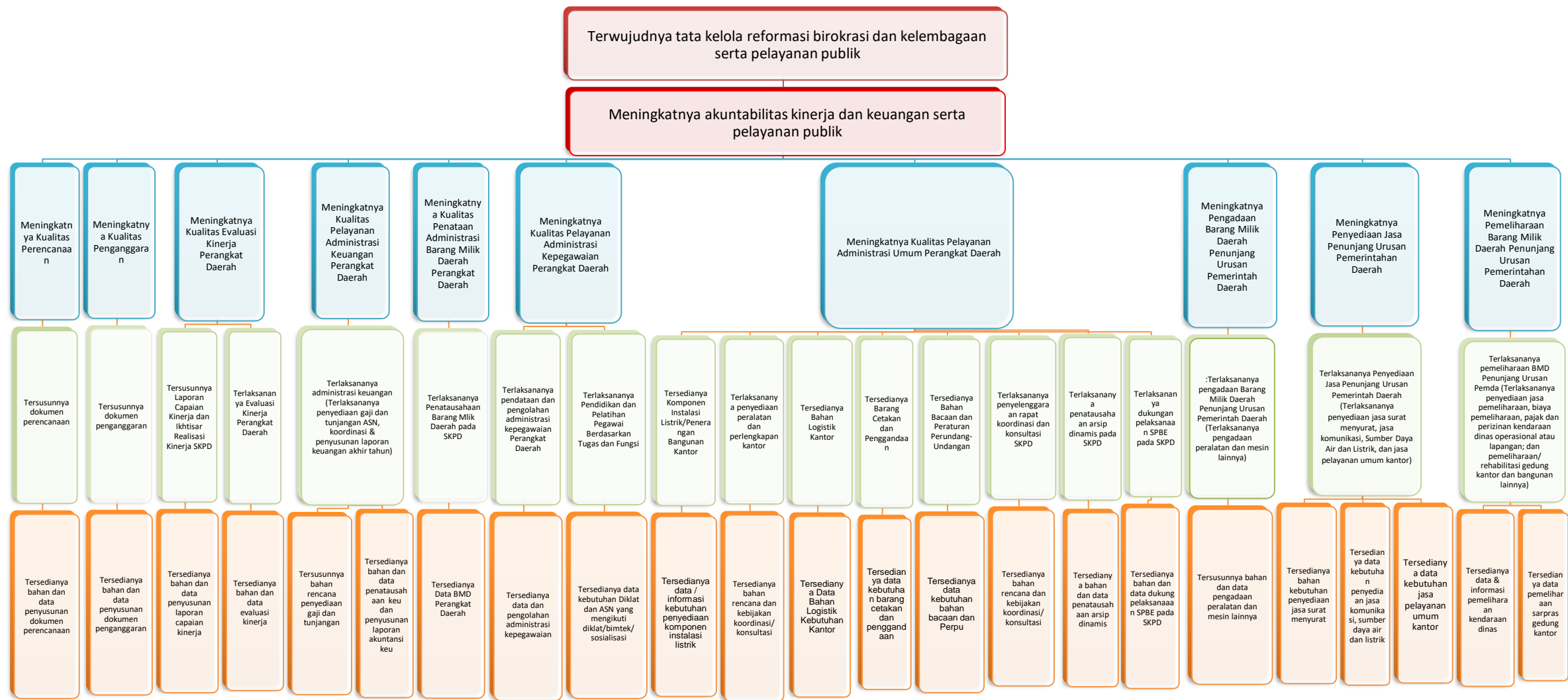
CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas Perencanaan
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas Penganggaran
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

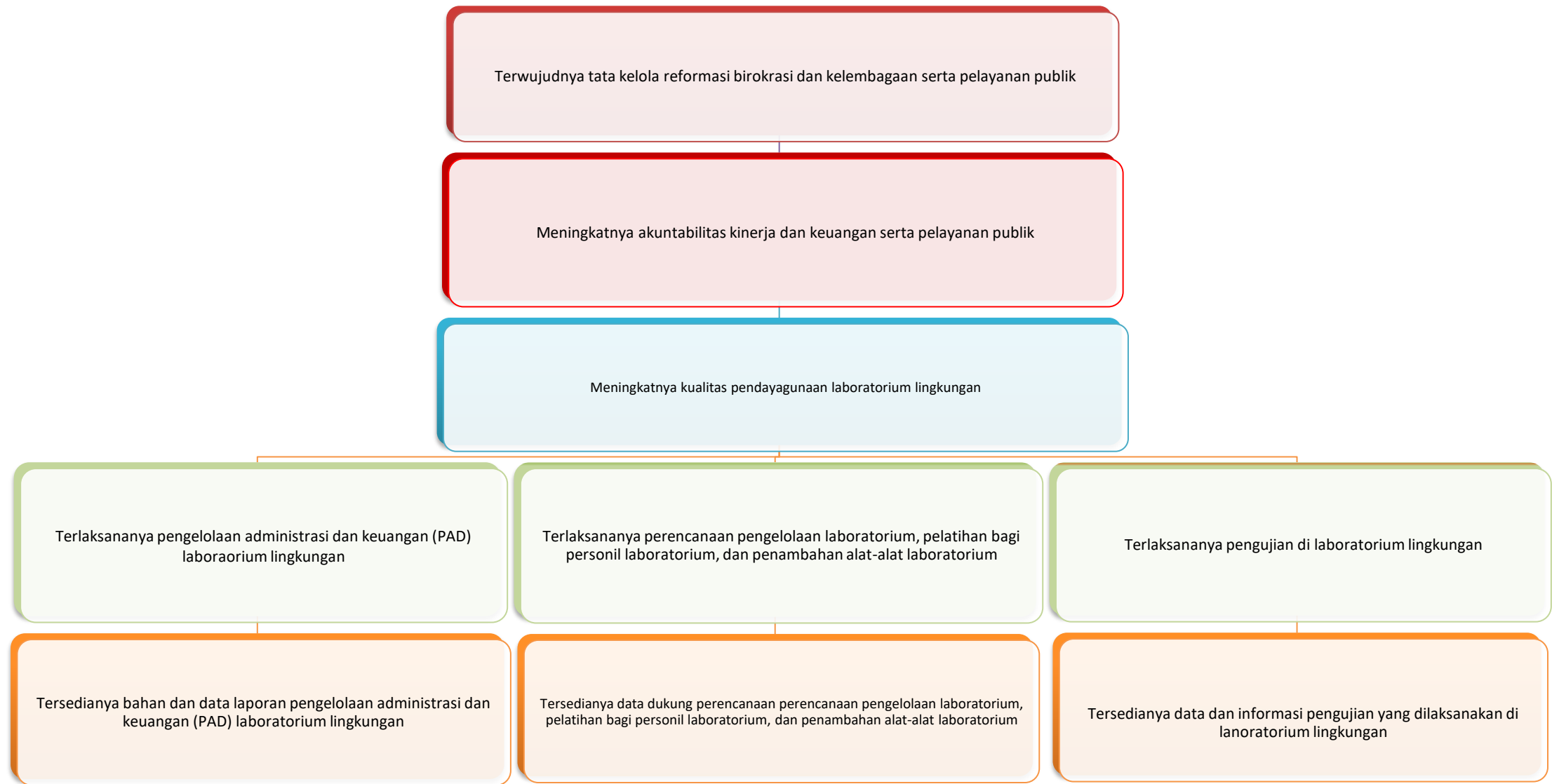
CSF 3

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
• Meningkatnya Kualitas Perencanaan	• Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
• Meningkatnya Kualitas Penganggaran	• Tersusunnya Dokumen Penganggaran (RKA dan DPA SKPD)
• Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	• Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
• Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan (penyediaan gaji dan tunjangan ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun)
• Meningkatnya Kualitas Penataan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	• Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
• Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	• Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
	• Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
• Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	• Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	• Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	• Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
	• Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
	• Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	• Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
	• Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
	• Terlaksananya dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD
• Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	• Terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya)
• Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan jasa pelayanan umum kantor)

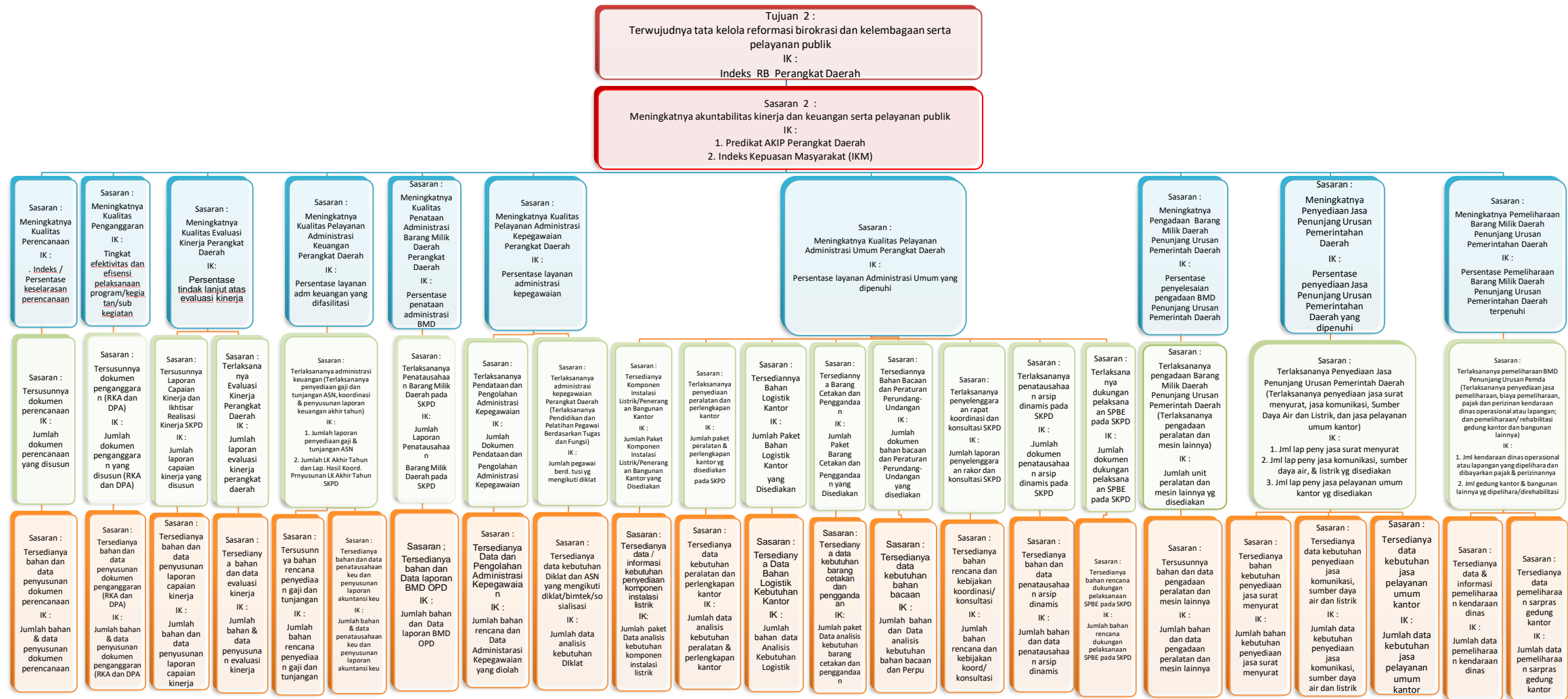
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan; dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya)
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya kualitas pendayagunaan laboratorium lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya perencanaan pengelolaan laboratorium, pelatihan bagi personil laboratorium, dan penambahan alat-alat laboratorium • Terlaksananya pengelolaan administrasi dan keuangan (PAD) laboraorium lingkungan • Terlaksananya pengujian di laboraorium lingkungan

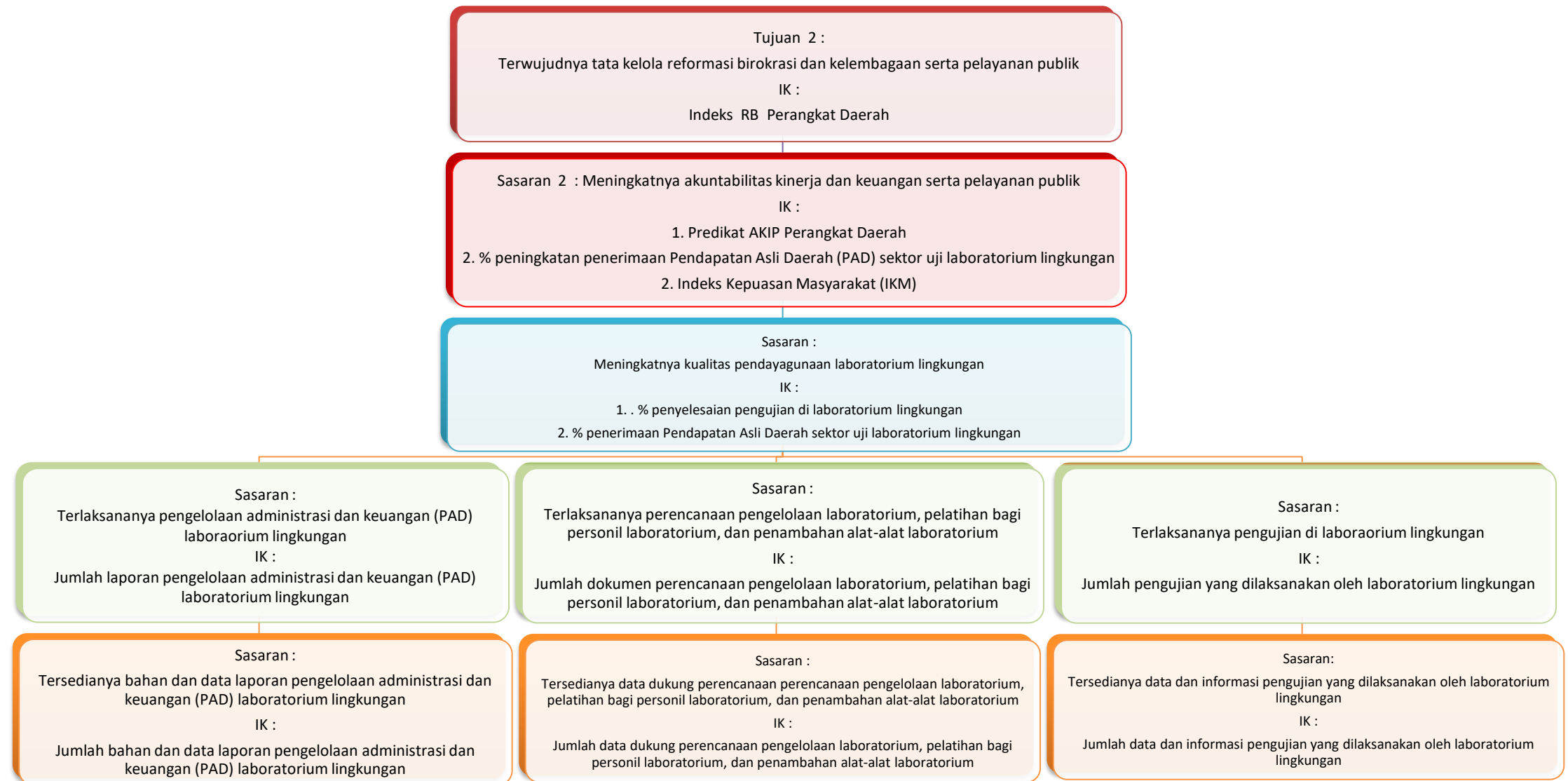
CSF (TUJUAN DLH 2)



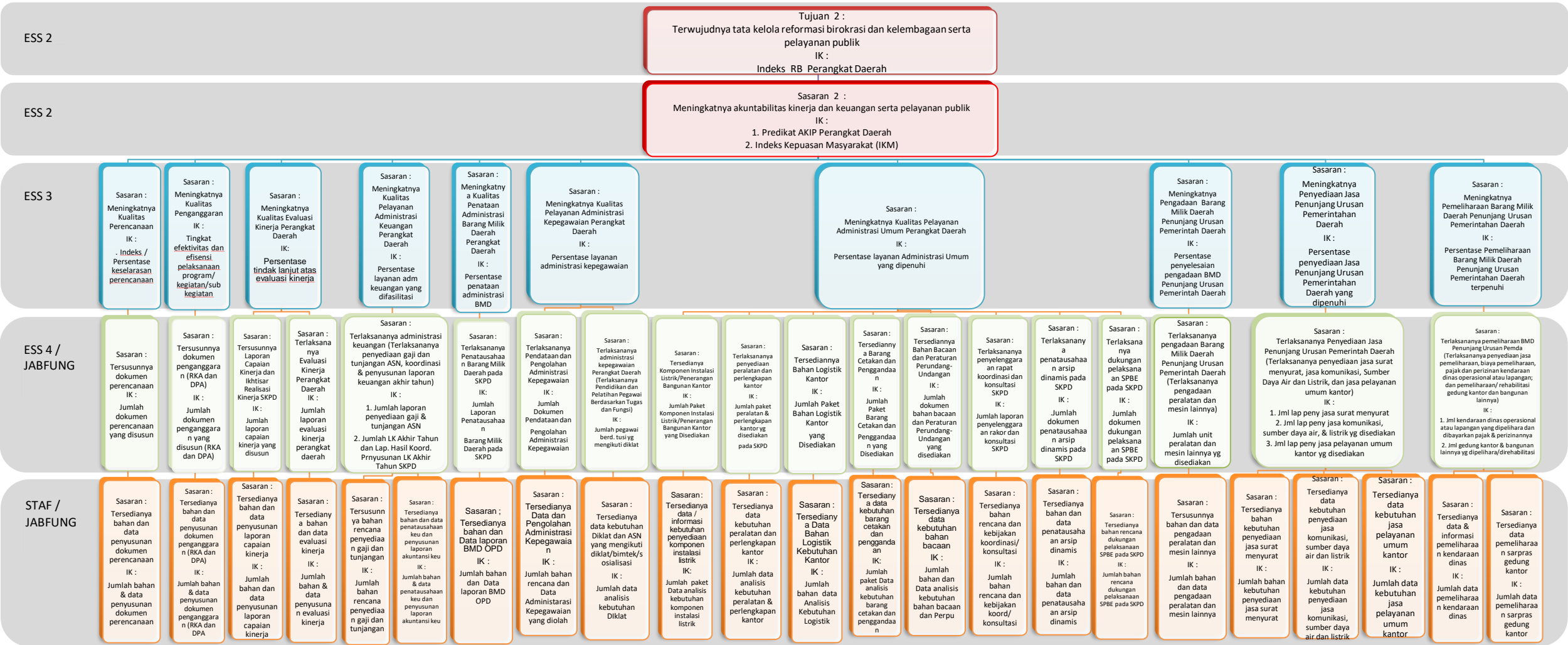


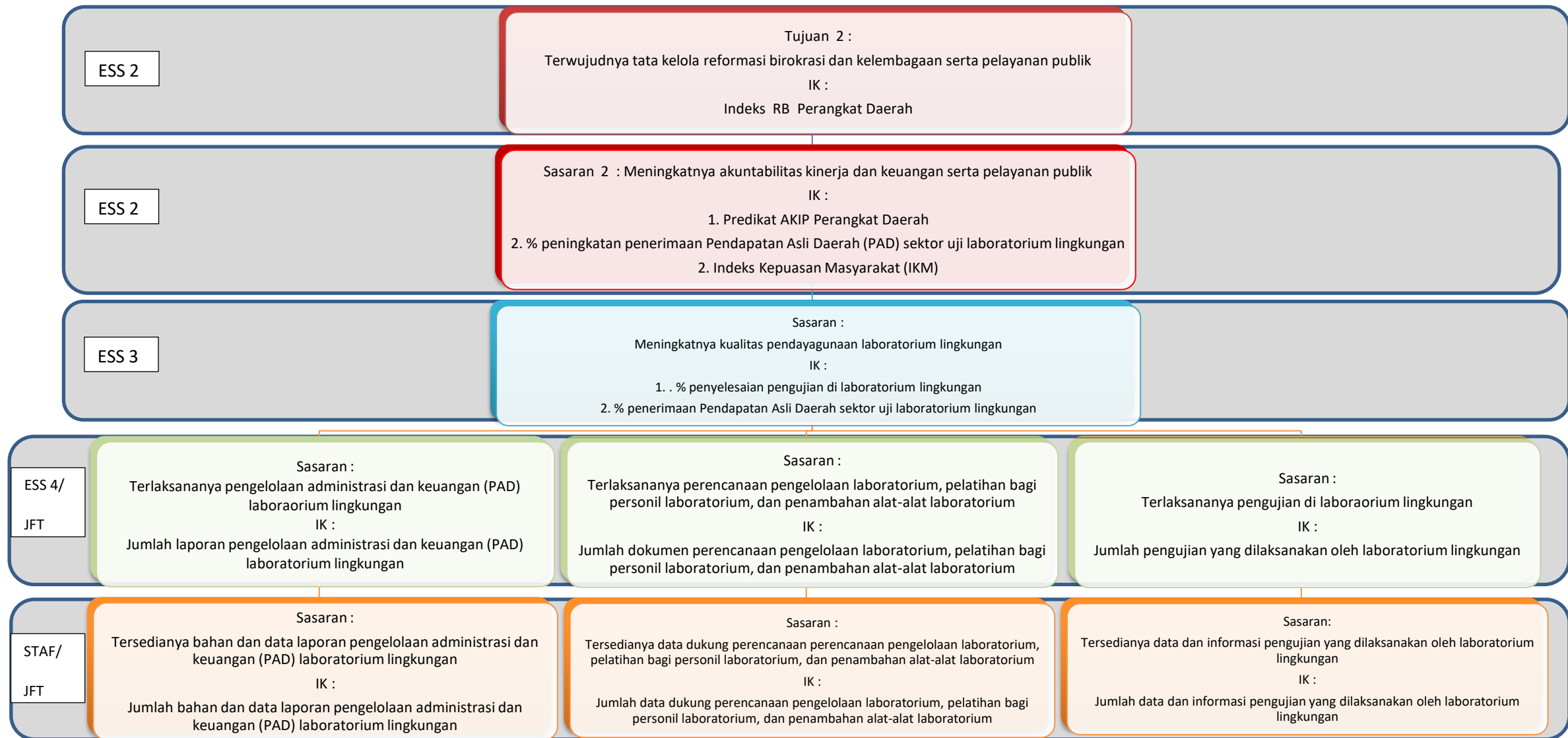
POHON KINERJA (TUJUAN DLH 2)





CASCADING KINERJA (TUJUAN DLH 2)





CROSSCUTTING KINERJA (TUJUAN DLH 2)

2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA REFORMASI BIROKRASI DAN KELEMBAGAAN SERTA PELAYANAN PUBLIK

Identifikasi CSF

CSF 1

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none">Rendahnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik

CSF 2

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan serta pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Kebijakan Akuntabilitas Kinerja
	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja
	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja
	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja
	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Internal
	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik
	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Implementasi Pelayanan Publik
	<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Monitoring Implementasi Pelayanan Publik

CSF 3

CSF	KONDISI YANG DIPERLUKAN
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Kebijakan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none">Tersusunnya Kebijakan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	<ul style="list-style-type: none">Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berbasis kinerja
	<ul style="list-style-type: none">Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none">Terlaksananya pengukuran capaian kinerja secara berkala
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	<ul style="list-style-type: none">Tersusunnya Laporan Kinerja mempedomani Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Internal	<ul style="list-style-type: none">Terlaksananya evaluasi kinerja internal secara berkala yang berdampak pada capaian kinerja
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">Tersusunnya Kebijakan Pelayanan Publik Perangkat Daerah (Proses Bisnis, SOP, Standar Pelayanan, dsb)
<ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Kualitas Implementasi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">Tersusunnya Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Monitoring dan Implementasi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelayanan Publik
---	---

CROSSCUTTING KINERJA (TUJUAN DLH 2)

